



Andi Iting¹
 Hamzah Harun²
 Andi Aderus³

RADIKALISME DALAM ISLAM. MELACAK AKAR PERMASALAHAN RADIKALISME DAN BAGAIMANA PENCEGAHANNYA

Abstrak

Berada di titik ekstrim atau melewati batas kewajaran dikenal sebagai radikalisme. Radikalisme dalam Islam dapat didefinisikan sebagai paham atau gerakan yang menginterpretasikan ajaran agama secara ekstrem dan kaku, sering kali tanpa memperhatikan konteks sosial, sejarah, atau kemanusiaan. Radikalisme muncul ketika ajaran Islam diterapkan secara literal dan menolak perbedaan, yang dapat mengarah pada tindakan intoleransi dan bahkan kekerasan terhadap pihak lain yang dianggap tidak sesuai atau "tidak murni" secara keagamaan. Faktor-faktor yang Memengaruhi Timbulnya Radikalisme adalah (a) Faktor Ekonomi dan Sosial, (b) faktor Politik dan Ketidakadilan, (c) faktor Ideologis dan Pendidikan, (d) Faktor Globalisasi dan Pengaruh Media Sosial, (e) Faktor Psikologis dan Kebutuhan Akan Identitas, (f) faktor Sejarah dan Konflik Regional. Radikalisme memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dampak ini tidak hanya memengaruhi stabilitas dan keamanan suatu negara, tetapi juga merusak nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang seharusnya menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Cara mencegah radikalisme dalam Islam memerlukan kerja sama antara pemerintah, ulama, dan masyarakat karena setiap pihak memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam mencegah radikalisme sangat penting. Pemerintah berperan melalui kebijakan dan program, ulama menyampaikan ajaran agama yang moderat, sementara masyarakat memperkuat ketahanan sosial. Kombinasi ini dapat menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap radikalisme.

Kata Kunci: Radikalisme.

Abstract

Being at the extreme or crossing the line of reasonableness is known as radicalism. Radicalism in Islam can be defined as an ideology or movement that interprets religious teachings in an extreme and rigid manner, often without interpret religious teachings in an extreme and rigid manner, often without regard to social, historical or humanitarian contexts. social, historical, or humanitarian contexts. Radicalism arises when the teachings of Islam are applied in a literal way and reject differences, which can lead to acts of intolerance and even radicalism. lead to acts of intolerance and even violence against others who are perceived to be who are deemed incompatible or religiously "impure". Factors that influence the emergence of radicalism are (a) economic and social factors, (b) political factors, and (c) political factors, and Social Factors, (b) Political and Injustice Factors, (c) Ideological and Educational Factors, (d) Globalization Factors. Education, (d) Globalization and Social Media Influence Factors, (e) Psychological Factors and the Need for Identity. Psychological Factors and the Need for Identity, (f) Historical Factors and Regional Conflicts. Regional Conflict. Radicalism has a significant impact on religious and social life, religious and social life. This impact not only affects the stability and security of a country, but also undermines the values of tolerance and diversity that should be the basis of social life. diversity that should be the basis of social life. How to preventing radicalism in Islam requires cooperation between the government, scholars, and the community because each party has a strategic role that complements each other. complementary. Collaboration between the government, scholars, and the community in preventing radicalism is very important. The government plays a role through policies and programs, clerics convey moderate religious teachings, while the community works to prevent radicalism.

Keywords: Radicalism.

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

email: fb.andiiting@gmail.com hamzahharun62@gmail.com andiaderus@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Radikalisme dalam Islam merupakan fenomena sosial-politik yang telah menjadi perhatian serius di berbagai negara. Pada dasarnya, radikalisme adalah ideologi atau pemikiran yang cenderung ekstrim, sering kali memaksakan perubahan fundamental dalam masyarakat melalui cara-cara kekerasan atau non-demokratis. Di dalam Islam, radikalisme sering kali dipicu oleh pemahaman agama yang sempit dan ditafsirkan secara kaku, di mana sebagian individu atau kelompok mengklaim bahwa tindakan mereka adalah cara yang benar dalam menjalankan ajaran agama. Fenomena ini tak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas nasional dan hubungan antar-agama.

Radikalisme dalam Islam adalah fenomena yang kompleks dan sering kali kontroversial. Ini merujuk pada interpretasi ekstrem dari ajaran Islam yang mendorong perubahan sosial dan politik yang radikal, sering kali melalui kekerasan. Radikalisme ini bisa muncul dari berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan sosial, politik, dan ekonomi, serta interpretasi tekstual yang ketat dari ajaran agama. Gerakan radikal dalam Islam sering kali menolak segala bentuk modernisasi dan sekularisasi, serta menuntut penerapan hukum syariah secara ketat. Mereka juga cenderung menolak dialog antaragama dan pluralisme, yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka. Penting untuk memahami bahwa radikalisme tidak mewakili mayoritas umat Islam. Sebagian besar umat Islam menolak kekerasan dan mendukung perdamaian serta toleransi. Radikalisme adalah tantangan yang dihadapi oleh banyak negara dan komunitas Muslim di seluruh dunia, dan upaya untuk mengatasinya memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan, dialog antar agama, dan kebijakan sosial yang inklusif.

Radikalisme telah menjadi isu krusial di berbagai belahan dunia, khususnya dalam konteks agama dan politik. Fenomena ini mengacu pada pandangan ekstrem yang menolak kompromi dan berupaya melakukan perubahan mendasar dalam masyarakat melalui cara-cara yang drastis, termasuk kekerasan. Radikalisme sering kali muncul karena berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti ketidakadilan sosial, pemahaman agama yang sempit, ketimpangan ekonomi, dan tekanan politik. Dalam beberapa dekade terakhir, radikalisme menjadi semakin kompleks karena pengaruh teknologi dan globalisasi, yang memungkinkan ideologi ekstrem menyebar lebih cepat dan luas.

Radikalisme dalam konteks agama, termasuk Islam, merujuk pada suatu paham atau gerakan yang ekstrem dan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Penting untuk dipahami bahwa radikalisme bukanlah ajaran Islam yang sebenarnya. Radikalisme dalam Islam seringkali dikaitkan dengan pemahaman agama yang sempit, literal, dan kaku. Kelompok radikal sering kali mengklaim memiliki interpretasi yang paling benar terhadap ajaran Islam, sehingga mereka merasa berhak untuk memaksakan pandangan mereka kepada orang lain, bahkan dengan cara kekerasan. Radikalisme adalah sebuah penyimpangan dari ajaran Islam yang sebenarnya. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, toleransi, dan kasih sayang. Untuk mencegah berkembangnya radikalisme, diperlukan upaya bersama dari seluruh komponen masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena memungkinkan penelitian mendalam dan kontekstual mengenai fenomena radikalisme dalam Islam. Dengan metode ini, peneliti dapat mengkaji kasus-kasus nyata dari Radikalisme secara rinci, memeriksa berbagai aspek dari bagaimana radikalisme terjadi, bagaimana tantangan spesifik yang muncul dalam proses penanganan dan solusi. Studi kasus menyediakan pandangan yang kaya tentang teknik yang digunakan oleh pelaku kejahatan radikalisme, respons dari lembaga penegak hukum, serta efektivitas dan kelemahan strategi yang diterapkan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menerapkan teori-teori radikalisme dalam Islam secara langsung dalam konteks praktis, mengevaluasi bagaimana motivasi pelaku dan dinamika kasus mempengaruhi penanganan kejahatan radikalisme. Dengan menganalisis detail-detail dari berbagai kasus, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola, evaluasi kebijakan, dan memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk solusi dalam penanganan. Pendekatan ini juga membantu menghubungkan teori dengan praktik, menjembatani kesenjangan antara penelitian akademis dan aplikasi dunia nyata, serta memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan strategi pencegahan dan penanganan terhadap Radikalisme dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Definisi dan pemahaman tentang radikalisme dalam Islam

Radikalisme dalam Islam merujuk pada pemahaman atau tindakan yang berorientasi pada kekerasan atau ekstremisme yang dianggap sebagai representasi ajaran Islam. Namun, para pakar dan akademisi menggarisbawahi bahwa radikalisme bukanlah bagian dari Islam, melainkan interpretasi sempit dan menyimpang dari ajaran agama yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti politik atau kekuasaan. Radikalisme umumnya berarti upaya mencapai perubahan besar melalui cara-cara ekstrem, kadang-kadang dengan kekerasan. Dalam konteks agama, radikalisme dalam Islam sering diartikan sebagai pandangan atau aksi yang mengabaikan nilai-nilai toleransi, damai, dan moderasi, serta lebih mengutamakan penafsiran literal dan keras terhadap hukum agama. Radikalisme dalam Islam adalah ideologi yang menuntut perubahan dan pembaruan dalam tatanan sosial dan politik sesuai dengan idealisme mereka. Gerakan ini sering kali menggunakan kekerasan dan menolak segala paham yang bertentangan dengan pemikiran mereka. Definisi radikalisme dalam Islam merujuk pada kecenderungan untuk menerapkan pemahaman agama secara ekstrem dan literal, yang sering kali mengarah pada sikap tidak toleran dan bahkan kekerasan terhadap pihak yang berbeda pendapat. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang definisi ini dan asal-usul radikalisme dalam Islam. Berikut beberapa di antaranya:

1. Karen Armstrong. Seorang sejarawan dan penulis terkenal tentang sejarah agama, Armstrong menjelaskan bahwa radikalisme dalam Islam, sebagaimana dalam agama lain, merupakan respons terhadap modernitas dan ketidakadilan sosial. Menurut Armstrong, kelompok radikal seringkali muncul sebagai reaksi terhadap tekanan politik dan sosial yang dihadapi umat Islam. Radikalisme, dalam pandangannya, adalah cara sebagian kelompok merespons krisis identitas dan ketidakpuasan terhadap sistem yang dianggap tidak adil atau tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman.
2. Olivier Roy. Seorang pakar studi Islam dan politik dari Prancis, Roy berpendapat bahwa radikalisme dalam Islam sering kali dipicu oleh krisis identitas daripada alasan teologis. Menurutnya, radikalisme lebih merupakan bentuk "Islamisasi radikalisme," di mana individu yang sudah memiliki kecenderungan radikal menggunakan Islam sebagai justifikasi. Dia menekankan bahwa faktor sosial dan politik lebih berperan dalam membentuk radikalisme daripada doktrin agama itu sendiri.
3. Muhammad Qutb. Seorang penulis dan pemikir dari kalangan Muslim konservatif, Qutb, dalam bukunya "Islam: The Misunderstood Religion," menjelaskan radikalisme sebagai sebuah respons terhadap dekadensi moral yang dianggap mengancam nilai-nilai Islam. Meskipun ia tidak mendukung kekerasan, pandangannya cenderung menyebut perlunya penerapan syariat Islam secara ketat dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini, bagaimanapun, sering disalahartikan dan menjadi landasan bagi beberapa kelompok radikal yang melihat pandangan Qutb sebagai pembenaran tindakan mereka.
4. Seyyed Hossein Nasr. Seorang sarjana Muslim kontemporer yang moderat, Nasr menyatakan bahwa radikalisme dalam Islam adalah hasil dari interpretasi yang sempit dan terputus dari nilai-nilai spiritual dalam Islam. Menurutnya, radikalisme muncul ketika ajaran Islam dipahami secara dangkal tanpa memahami kedalaman makna, konteks, dan esensi Islam yang damai. Nasr menekankan pentingnya pemahaman Islam yang komprehensif dan mendalam untuk menghindari interpretasi yang ekstrem.
5. Azyumardi Azra. Seorang intelektual Muslim dari Indonesia, Azra menekankan bahwa radikalisme dalam Islam di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakadilan sosial, ekonomi, serta tekanan politik. Menurutnya, radikalisme tidak mencerminkan ajaran Islam secara keseluruhan, tetapi muncul sebagai respons terhadap kondisi-kondisi tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam. Azra menegaskan pentingnya pendidikan Islam moderat untuk mencegah radikalisme.

Secara etimologis, kata "radikal" dalam bahasa Inggris dapat berarti "sampai ke akarnya" dan "bertindak radikal." Berada di posisi ekstrim atau melewati batas kewajaran dikenal sebagai radikalisme. Menurut Afif Muhammad, radikalisme adalah sesuatu yang mendasar atau mendasar; fanatik terhadap suatu pendapat dan menegasikan pendapat orang lain; mengabaikan historitas Islam; dan memahami teks agama secara harfiah tanpa mempertimbangkan tujuan

esensial syariat (maqasid al-syaria). Predikat ini dapat diterapkan pada ide atau keyakinan tertentu, menghasilkan istilah pemikiran radikal dan gerakan. Oleh karena itu, radikalisme didefinisikan sebagai paham atau aliran keras yang dengan keras atau drastis menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik. Mereka juga memiliki sikap ekstrem dalam politik.

Radikalisme keagamaan berarti memperjuangkan keyakinan keagamaan mereka tanpa kompromi, kadang-kadang dengan kekerasan dan anarkisme. Seperti yang disebutkan di atas, radikalisme didefinisikan sebagai doktrin yang dipegang oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara yang memaksa. Namun dari sudut pandang keagamaan, dapat digambarkan sebagai paham yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi. Penganut aliran atau paham ini cenderung memahami al-Qur'an secara tekstual dan literal, sehingga tidak jarang mereka menggunakan cara anarkis, anti toleransi, anti dialog, dan destruktif. Pada prinsipnya, penting untuk membedakan antara radikalisasi, radikalisme, dan radikalisme. Hasyim Muzadi mengatakan bahwa berpikir radikal adalah wajar dan bahkan seharusnya. Misalnya, ada seseorang yang secara pribadi percaya bahwa Indonesia mengalami banyak masalah karena tidak menerapkan hukum Islam, oleh karena itu sistem pemerintahan Islam menggantikan dasar negara. Pendapat ekstrim dapat diterima. Sekeras apapun pernyataan di atas, tidak akan menjadi masalah publik jika hanya terjadi dalam wacana atau pemikiran. Hal ini karena ingatan tidak dapat diadili karena tidak termasuk tindak pidana. Dalam hal ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikiran; sebaliknya, hukuman harus berasal dari tindakan atau kealpaan seseorang.

Menurut Hasyim Muzadi, radikalisme adalah definisi dari paham atau ideologi yang radikal. Dalam kebanyakan kasus, mereka akan menjadi radikal secara permanen. Demokratis, kekuatan masyarakat, dan teror dapat muncul dari isme radikal seperti ini. Dengan kata lain, radikalisme adalah ideologi dan gaya hidup yang sudah berkembang. Dalam hal ini, setiap orang memiliki kecenderungan untuk menjadi radikal dan menganut paham radikal, terlepas dari apakah kebiasaan atau lingkungan mereka mendukungnya atau tidak. Muzadi menyatakan bahwa radikalisasi berarti seseorang menjadi reaktif ketika ketidakadilan terjadi di masyarakat. Ketidakadilan politik, ekonomi, dan penegakan hukum biasanya dikaitkan dengan peningkatan radikalisasi. Oleh karena itu, tidak perlu berasumsi bahwa radikalisme menghilang begitu teroris ditangkap. Keadilan mencakup banyak hal, seperti politik, hukum, pendidikan, sosial, hak asasi, dan budaya. Radikalisasi akan selalu muncul di masyarakat sepanjang kemakmuran dan peristiwa belum terwujud. Jika seseorang atau kelompok menginginkan perubahan sosial atau politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrem, itu disebut sebagai radikalisme. Kekerasan agama sering dikaitkan dengan radikalisme agama. Meskipun hubungan ini tidak selalu tepat, namun ada diskusi yang sering terungkap ke permukaan bahwa radikalisme agama terkait erat dengan kekerasan agama. Mereka yang ingin melakukan perubahan menunjukkan perilaku radikal.

Dari berbagai pandangan ini, Radikalisme dalam Islam dapat didefinisikan sebagai paham atau gerakan yang menginterpretasikan ajaran agama secara ekstrem dan kaku, sering kali tanpa memperhatikan konteks sosial, sejarah, atau kemanusiaan. Radikalisme muncul ketika ajaran Islam diterapkan secara literal dan menolak perbedaan, yang dapat mengarah pada tindakan intoleransi dan bahkan kekerasan terhadap pihak lain yang dianggap tidak sesuai atau "tidak murni" secara keagamaan.

b. Akar Permasalahan Munculnya Radikalisme dalam Islam

1. Akar Sejarah Radikalisme dalam Islam

Radikalisme dalam Islam memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Fenomena ini sering kali dikaitkan dengan berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi dunia Islam sepanjang sejarah. Salah satu contoh awal radikalisme dalam Islam adalah gerakan Khawarij yang muncul pada abad ke-7 Masehi, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khawarij dikenal dengan pandangan mereka yang ekstrem dan tidak kenal kompromi, serta tindakan kekerasan yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka. Pada abad ke-20, radikalisme dalam Islam kembali muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat di dunia Islam. Krisis identitas dan ketidakpuasan terhadap dominasi Barat mendorong beberapa kelompok untuk mengadopsi pandangan radikal sebagai bentuk

perlawanan. Sejarah perilaku kekerasan dalam Islam sering dikaitkan dengan masalah politik, yang mengubah agama sebagai simbol. Ini adalah fakta sejarah yang tidak dapat dibantah. Namun, pembunuhan khalifah terjadi selama pemerintahan Khalifah Umar. Namun, setelah perang Shiffin, yang terjadi selama pemerintahan Ali bin Abi Thalib, gerakan radikalisme yang sistematis dan terorganisir baru dimulai. Munculnya gerakan teologis radikal yang dikenal sebagai "Khawarij" menandai hal ini.

Kata "khawarij" berasal dari bahasa Arab, "kharaja", yang berarti "keluar, muncul, timbul, atau memberontak." Oleh karena itu, kata tersebut juga dapat diartikan sebagai kelompok orang Islam atau Muslim yang keluar dari ikatan umat Islam. Dalam teologi Islam, Khawarij mengacu pada kelompok atau aliran kalam yang berasal dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar dari barisannya karena tidak setuju dengan keputusan Ali yang menerima arbitrase (tahkim) atau perjanjian damai dengan kelompok pemberontak Mu'awiyah bin Abi Sufyan tentang persengketaan kekuasaan (khilafah). Kelompok Khawarij berpendapat bahwa keputusan Ali adalah tindakan yang salah dan hanya akan menguntungkan kelompok pemberontak. Situasi ini mendorong beberapa tentara Ali keluar dari barisannya.

Sebagai akibat dari konflik politik setelah kematian Khalifah Usman bin Affan, arbitrase terjadi selama perang shiffin antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Ketika Ali terpilih menjadi khalifah, beberapa sahabatnya, termasuk Gubernur Damaskus saat itu Mu'awiyah bin Abi Sufyan, menentangnya. Ali, bersama dengan Talhah dan Zubair, tidak diakui oleh Mu'awiyah sebagai khalifah. Mereka meminta Ali untuk menghukum orang yang membunuh Khalifah Usman bin Affan. Mereka bahkan mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib juga terlibat dalam pembunuhan itu. Muhammad Ibn Abi Bakr, anak angkat Ali bin Abi Thalib, adalah salah satu pemberontak Mesir yang datang ke Madinah dan kemudian membunuh Usman bin Affan. Selain itu, ketika Muhammad Ibn Abi Bakr diangkat dan ditunjuk sebagai gubernur Mesir, Ali tidak mengambil tindakan keras terhadap pemberontak.

Dalam perang besar antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Mu'awiyah bin Abi Sufyandi Shiffin, konflik politik mencapai puncaknya. Pasukan Ali dapat mendesak dan memukul mundur tentara, sehingga Amir ibn al-Ash, anggota pasukan Mu'awiyah yang terkenal licik, meminta perdamaian dengan mengangkat al-Qur'an ke atas. Qurra', seorang sahabat Ali dari kelompoknya, memintanya untuk menerima tawaran itu. Dua orang dipilih sebagai perantara, Amir bin al-Ash dari pihak Mu'awiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali, untuk membentuk kerangka perdamaian dengan permintaan itu. Dalam sejarah, kedua belah pihak setuju untuk tidak menjatuhkan kedua pemuka sahabat yang bertentangan. Namun, akibat kelicikan Amir bin al-Ash, keputusan tersebut menguntungkan Mu'awiyah karena ia mengatakan hanya menyetujui pemakzulan Ali bin Abi Thalib yang telah diumumkan sebelumnya oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan menolak untuk menjatuhkan Mu'awiyah. Akibatnya, Mu'awiyah diangkat menjadi Khalifah yang tidak sah melalui alias yang tidak sah. Oleh karena itu, sebagai kelompok Islam yang berpikir radikal, Khawarij merupakan bentuk dari kekecewaan politik terhadap keputusan yang merugikan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya, sejumlah kecil orang yang mendukung Ali meninggalkan, menolak solusi perang dengan tahkim manusia. Namun, dengan semboyan "La hukma Illa Lillah", yang berarti "tidak ada hukum selain hukum Allah," hanya Allah yang dapat membuat keputusan. Mereka yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib ini dan kemudian menamakan dirinya sebagai golongan "Khawarij" menganggap Ali bin Abi Thalib, Amir bin al-Ash, Abu Musa al-Asy'ari, dan Mu'awiyah, serta orang lain yang setuju atau menerima tahkim atau arbitrase adalah kafir karena mereka tidak bergantung pada al-Qur'an untuk menyelesaikan masalah ini.

Kelompok "khawarij" membangun persoalan teologis Islam dari masalah kafir ini. Karena mereka percaya bahwa sahabat-sahabat yang terlibat dalam arbitrase adalah kafir, mereka dianggap keluar dari Islam atau murtad, dan karena itu, pembunuhan mereka dibenarkan. Pada akhirnya, sejarah mencatat pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sejarah menunjukkan radikalisme Khawarij sebagai pemberontak. Tidak hanya selama pemerintahan Ali, Khawarij terus menentang kekuasaan Islam resmi selama Dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah. Akibatnya, mereka mendirikan pemerintahan Khawarij dan memilih Imam sendiri. Pemahaman dan tindakan adalah inti dari radikalisme gerakan ini.

Rekaman sejarah menunjukkan bahwa fundamentalisme mengutamakan membenaran saat menggunakan kekerasan atas nama agama. Dianggap bahwa agama Islam mengajarkan para

pengikutnya yang fanatik untuk melakukan peristiwa semacam itu, ada juga orang yang berpikir bahwa ada sekelompok orang Islam yang percaya bahwa Tuhan telah menyuruh mereka untuk melakukan apa pun yang mereka bisa untuk membela agama mereka, meskipun itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang universal yang toleran dan akomodatif.

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Timbulnya Radikalisme

Radikalisme tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor yang saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor utama yang sering dikaitkan dengan timbulnya radikalisme:

a. Faktor Ekonomi dan Sosial

Kondisi ekonomi yang buruk, seperti kemiskinan dan pengangguran, seringkali menjadi faktor yang memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam radikalisme. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan terhadap keadaan sosial dan ekonomi, sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh ideologi radikal yang menawarkan perubahan cepat dan drastis. Menurut Hassan (2018), banyak individu yang terlibat dalam gerakan radikal berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang stabil, yang membuat mereka rentan terhadap janji-janji kelompok radikal yang menawarkan perbaikan ekonomi.

b. Faktor Politik dan Ketidakadilan

Ketidakadilan dan marginalisasi politik sering kali menjadi pemicu munculnya radikalisme. Kelompok atau individu yang merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil oleh pemerintah cenderung mencari saluran alternatif untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Situasi politik yang represif dan diskriminatif, menurut Esposito (2018), seringkali mendorong individu atau kelompok untuk beralih pada ideologi radikal sebagai bentuk perlawanan atau upaya mencari identitas politik baru.

c. Faktor Ideologis dan Pendidikan

Pendidikan yang kurang berkualitas, terutama pendidikan agama yang bersifat eksklusif dan tidak moderat, juga dapat menjadi lahan subur bagi munculnya paham radikal. Kurangnya pemahaman agama yang mendalam serta adanya penafsiran yang sempit dan literal terhadap teks agama menjadi faktor pendorong utama. Azra (2013) menunjukkan bahwa mereka yang tidak memiliki akses pada pemahaman agama yang moderat lebih rentan terhadap ajakan untuk mendukung aksi radikal.

d. Faktor Globalisasi dan Pengaruh Media Sosial

Perkembangan teknologi dan akses pada informasi global memungkinkan penyebaran ideologi radikal lebih cepat melalui internet dan media sosial. Media sosial telah menjadi alat utama bagi kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota baru, dan membentuk jaringan internasional. Penelitian oleh Schmid (2015) menunjukkan bahwa media sosial memberikan ruang bebas bagi individu untuk mengakses dan menyebarkan konten radikal tanpa adanya kontrol yang memadai.

e. Faktor Psikologis dan Kebutuhan Akan Identitas

Kebutuhan untuk merasa berharga, memiliki tujuan, dan diterima dalam suatu kelompok dapat memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam radikalisme. Kelompok radikal sering kali memberikan identitas yang kuat dan dukungan moral bagi anggotanya, terutama bagi mereka yang merasa tersisih dalam masyarakat. Horgan (2005) menyebutkan bahwa faktor psikologis seperti ketidakpuasan diri, rasa ketidakadilan pribadi, dan pencarian makna hidup adalah elemen penting yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam aksi radikal.

f. Faktor Sejarah dan Konflik Regional

Sejarah panjang konflik di wilayah tertentu dapat menjadi faktor pemicu radikalisme. Misalnya, konflik yang melibatkan kekuatan asing atau perebutan sumber daya alam sering kali meninggalkan dampak berupa kebencian yang mendalam, sehingga beberapa kelompok atau individu cenderung memilih jalan radikal sebagai bentuk pembalasan. Konflik di Timur Tengah adalah salah satu contoh di mana konflik yang berkepanjangan memicu munculnya kelompok-kelompok radikal yang merasa dipinggirkan secara sistematis.

3. Dampak Radikalisme bagi Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat

Radikalisme memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dampak ini tidak hanya memengaruhi stabilitas dan keamanan suatu negara,

tetapi juga merusak nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang seharusnya menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Dampak Radikalisme bagi Kehidupan Beragama sebagai berikut:

- a. Pelemahan Toleransi Antarumat Beragama
Radikalisme merusak keharmonisan antarumat beragama dengan mengedepankan pandangan yang eksklusif dan intoleran. Kelompok radikal cenderung menganggap ajaran mereka sebagai satu-satunya kebenaran dan menolak keberadaan kelompok atau keyakinan lain. Menurut Azra (2013), radikalisme dapat memicu konflik antara kelompok agama, memperlebar jurang perbedaan, dan menghambat upaya dialog antarumat beragama.
 - b. Perusakan Citra Agama
Tindakan radikal sering kali dikaitkan dengan agama tertentu, meskipun sebenarnya radikalisme tidak memiliki basis agama yang kuat. Hal ini menciptakan stigma negatif terhadap agama tersebut, terutama ketika aksi kekerasan dilakukan dengan mengatasnamakan agama. Esposito (2018) menjelaskan bahwa radikalisme telah memberikan citra yang keliru tentang Islam di mata dunia, mengasosiasikannya dengan kekerasan dan ekstremisme. Hal ini merusak citra agama dan menciptakan prasangka negatif terhadap penganutnya.
 - c. Distorsi Ajaran Agama
Radikalisme seringkali mendistorsi ajaran agama dengan menafsirkan teks-teks keagamaan secara sempit dan literal, tanpa mempertimbangkan konteks historis dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Distorsi ini berpotensi mengaburkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama, sehingga agama dipandang sebagai sesuatu yang keras dan tidak ramah. Hassan (2018) menunjukkan bahwa kelompok radikal mengadopsi interpretasi yang sempit dan menolak pandangan lain, yang akhirnya merusak pemahaman agama yang lebih moderat.
 - d. Menyebabkan Fragmentasi Internal dalam Agama yang Sama
Radikalisme tidak hanya menimbulkan konflik dengan agama lain, tetapi juga menciptakan perpecahan di antara umat dalam agama yang sama. Kelompok-kelompok radikal cenderung menganggap penafsiran mereka sebagai satu-satunya kebenaran, dan menganggap kelompok yang berbeda pandangan sebagai "musuh" atau "sesat." Horgan (2005) mengamati bahwa radikalisme memicu perpecahan di dalam agama dengan menciptakan faksi-faksi yang saling bertentangan, melemahkan kekuatan internal agama itu sendiri.
 - e. Memicu Ketidakpercayaan Terhadap Lembaga Keagamaan
Radikalisme yang berkembang dalam suatu agama dapat membuat masyarakat menjadi tidak percaya pada lembaga-lembaga keagamaan resmi yang dianggap tidak cukup berperan dalam menangkal ekstremisme. Akibatnya, otoritas keagamaan yang moderat sering kali dilemahkan, dan kelompok-kelompok radikal cenderung berusaha menarik simpati dari masyarakat dengan mengklaim bahwa mereka adalah "penjaga kebenaran agama." Schmid (2015) menyebutkan bahwa kurangnya peran lembaga agama dalam mencegah radikalisme dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap otoritas agama.
4. Dampak radikalisme bagi Kehidupan Bermasyarakat
- a. Ancaman terhadap Keamanan dan Stabilitas Sosial
Aksi radikal seperti terorisme dan kekerasan dapat menyebabkan ketakutan dan kecemasan dalam masyarakat. Radikalisme mengancam keamanan publik dan ketertiban sosial karena aksi kekerasan yang tidak terduga dapat terjadi kapan saja. Schmid (2015) menekankan bahwa radikalisme menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat luas dan mengganggu kehidupan sehari-hari, menciptakan situasi yang penuh ketegangan.
 - b. Pengaruh Negatif pada Generasi Muda
Radikalisme sering kali menargetkan generasi muda melalui propaganda yang disebarluaskan melalui media sosial dan platform digital. Generasi muda yang terpengaruh oleh ideologi radikal berpotensi kehilangan arah hidup yang positif dan terlibat dalam kegiatan yang destruktif. Hassan (2018) menunjukkan bahwa anak muda yang rentan dapat menjadi sasaran utama kelompok radikal, mengingat bahwa mereka memiliki semangat dan jiwa pemberontak yang lebih tinggi, yang sering disalurkan ke dalam aksi-aksi ekstrem.
 - c. Kerusakan Ekonomi dan Kehidupan Sosial

Radikalisme yang berujung pada aksi terorisme menyebabkan kerugian besar pada sektor ekonomi, seperti pariwisata, investasi, dan perdagangan. Selain itu, radikalisme juga menghancurkan kehidupan sosial melalui fragmentasi dan polarisasi masyarakat. Gerges (2016) menyebutkan bahwa aksi radikalisme/terorisme yang didorong oleh radikalisme berdampak langsung pada ekonomi, menurunkan tingkat investasi dan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk keamanan.

d. Menghambat Keharmonisan dan Solidaritas Sosial

Radikalisme sering kali menebar kebencian antar kelompok atau menciptakan polarisasi di dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan atau curiga, sehingga solidaritas dan keharmonisan yang seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat terganggu. Azra (2013) mencatat bahwa radikalisme merusak hubungan antar individu dan kelompok dengan menyebarkan ideologi yang mendorong permusuhan dan intoleransi.

e. Meningkatkan Diskriminasi dan Stigma terhadap Kelompok Tertentu

Radikalisme, terutama ketika dikaitkan dengan agama atau kelompok tertentu, dapat menyebabkan diskriminasi dan prasangka negatif terhadap kelompok tersebut. Misalnya, komunitas Muslim sering kali menjadi sasaran diskriminasi di beberapa negara karena aksi radikal yang mengatasnamakan Islam. Esposito (2018) mencatat bahwa radikalisme telah meningkatkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama tertentu dan memperkuat stereotip negatif, yang pada gilirannya memicu ketegangan antar kelompok masyarakat.

f. Melemahkan Rasa Saling Percaya di Antara Anggota Masyarakat

Radikalisme membuat masyarakat menjadi lebih curiga satu sama lain, terutama terhadap kelompok atau individu yang dianggap berbeda. Ketidakpercayaan ini melemahkan kohesi sosial dan menghambat kerja sama di antara anggota masyarakat. Horgan (2005) mengamati bahwa ketakutan dan prasangka yang ditimbulkan oleh radikalisme menghambat interaksi sosial yang sehat dan memperlemah jaringan sosial yang seharusnya mendukung stabilitas masyarakat.

c. Peran Pemerintah, Ulama, dan Masyarakat dalam Mencegah Radikalisme

Mencegah radikalisme memerlukan kerja sama antara pemerintah, ulama, dan masyarakat karena setiap pihak memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Berikut adalah peran yang dapat dilakukan oleh ketiga pihak ini dalam upaya mencegah radikalisme:

1. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan dan program yang menanggulangi radikalisme secara komprehensif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain:

- a. Pendidikan Moderasi Agama: Pemerintah dapat memasukkan pendidikan nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam kurikulum pendidikan nasional. Esposito (2018) mencatat bahwa pendidikan merupakan sarana penting untuk membentuk pemahaman agama yang moderat dan menghargai keberagaman.
- b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi: Banyak individu yang terlibat dalam radikalisme berasal dari kelompok ekonomi lemah. Program yang meningkatkan kesejahteraan sosial dapat mencegah individu terpengaruh oleh kelompok radikal. Hassan (2018) menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu kunci untuk meminimalisir kerentanan terhadap ajaran radikal.
- c. Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Tindakan Radikal: Pemerintah juga perlu memastikan adanya hukum yang melarang dan menghukum kegiatan radikal. Gerges (2016) menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang tegas dan pengawasan ketat terhadap gerakan radikal dapat menekan perkembangan ideologi ekstrem.
- d. Mengadakan Program Deradikalisasi dan Rehabilitasi untuk Mantan Anggota Kelompok Radikal. Deradikalisasi dan rehabilitasi untuk mereka yang terlibat dalam kelompok radikal dapat mengurangi potensi kembalinya mereka ke ideologi ekstrem. Program deradikalisasi yang sukses mencakup konseling psikologis, pelatihan kerja, dan reintegrasi sosial. Gerges (2016) menjelaskan bahwa program rehabilitasi ini penting dalam mengurangi risiko serangan berulang serta membantu mantan anggota radikal untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat

2. Peran Ulama dan Tokoh Agama

Ulama dan tokoh agama memiliki peran sentral dalam menyampaikan ajaran agama yang moderat dan mencegah penyebaran ideologi radikal di masyarakat. Peran mereka antara lain:

- a. Mempromosikan Islam rahmatan lil 'alamin: Mempromosikan Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin atau "rahmat bagi seluruh alam" sangat penting dalam menghadapi radikalisme. Konsep ini menekankan nilai-nilai perdamaian, kasih sayang, dan keadilan yang universal, yang bertolak belakang dengan ideologi radikal yang seringkali menggunakan tafsir sempit dan eksklusif.
- b. Menyebarkan Pemahaman Agama yang Moderat dan Damai: Ulama perlu menyampaikan tafsir agama yang menekankan nilai-nilai perdamaian dan menghormati perbedaan. Azra (2013) menyebutkan bahwa ulama memiliki tanggung jawab besar dalam memperkenalkan konsep Islam yang inklusif dan mencegah interpretasi yang eksklusif.
- c. Mengadakan Dialog Antaragama: Tokoh agama dapat mempromosikan dialog antaragama yang mendorong toleransi dan pengertian antara berbagai kelompok keagamaan. Dialog ini juga bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya hidup rukun dalam keberagaman.
- d. Meluruskan Pemahaman yang Keliru tentang Jihad dan Martabat Agama:** Kelompok radikal seringkali menggunakan konsep-konsep agama, seperti jihad, secara salah untuk memengaruhi masyarakat. Ulama dapat berperan dalam meluruskan pemahaman ini agar tidak disalahartikan. Horgan (2005) menekankan bahwa peran ulama sangat penting dalam memberikan pemahaman yang benar terkait konsep-konsep sensitif dalam agama.

3. Peran Masyarakat

Masyarakat, termasuk keluarga dan lembaga sosial lainnya, juga memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran radikalisme. Beberapa peran masyarakat antara lain:

- a. Membangun Ketahanan Sosial dengan Menguatkan Solidaritas dan Toleransi: Masyarakat yang kuat dan solid memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap pengaruh radikalisme. Dengan menjalin solidaritas sosial dan toleransi di dalam komunitas, masyarakat dapat bersama-sama menolak ideologi radikal. Schmid (2015) mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah radikalisme dengan memperkuat jaringan sosial dan komunitas.
- b. Pengawasan Terhadap Lingkungan Sosial: Keluarga dan masyarakat harus peka terhadap tanda-tanda radikalisasi, terutama pada generasi muda. Orang tua dan komunitas harus mendampingi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh ajaran radikal. Moghaddam (2006) menyoroti bahwa komunitas lokal yang peduli dan waspada dapat membantu mengidentifikasi dan menangani indikasi awal radikalisasi.
- c. Penggunaan Media Sosial Secara Bijak: Mengingat media sosial sering kali digunakan sebagai sarana penyebaran ideologi radikal, masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk menyaring informasi dengan bijak dan tidak terpengaruh oleh propaganda radikal yang menyebar di internet.

Kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam mencegah radikalisme sangat penting. Pemerintah berperan melalui kebijakan dan program, ulama menyampaikan ajaran agama yang moderat, sementara masyarakat memperkuat ketahanan sosial. Kombinasi ini dapat menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap radikalisme. Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk sub topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Radikalisme dalam Islam dapat didefinisikan sebagai paham atau gerakan yang menginterpretasikan ajaran agama secara ekstrem dan kaku, sering kali tanpa memperhatikan konteks sosial, sejarah, atau kemanusiaan. Radikalisme muncul ketika ajaran Islam diterapkan secara literal dan menolak perbedaan, yang dapat mengarah pada tindakan intoleransi dan bahkan kekerasan terhadap pihak lain yang dianggap tidak sesuai atau "tidak murni" secara keagamaan.
2. Akar permasalahan munculnya radikalisme dalam Islam dapat dilacak ke berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, maupun pemahaman agama.

Dalam sejarah, munculnya radikalisme sering kali terjadi dalam konteks ketidakadilan, krisis identitas, atau konflik politik yang melibatkan umat Islam. Salah satu contoh awal adalah kemunculan kaum Khawarij, yang menjadi radikal setelah perpecahan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kaum Khawarij mengadopsi pandangan ekstrem bahwa siapa pun yang tidak sejalan dengan mereka dianggap kafir dan layak diperangi, sebuah pola pemikiran yang kemudian menjadi ciri radikalisme dalam Islam. Cara mencegah radikalisme dalam Islam memerlukan kerja sama antara pemerintah, ulama, dan masyarakat karena setiap pihak memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam mencegah radikalisme sangat penting. Pemerintah berperan melalui kebijakan dan program, ulama menyampaikan ajaran agama yang moderat, sementara masyarakat memperkuat ketahanan sosial. Kombinasi ini dapat menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Anzar, (2016). Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Histori
- Amirudin La Dae, UIN Alauddin Makassar, dan Isji Hardi, IAIN Ternate, "Radikalisme dalam Islam (Analisis terhadap Gerakan dan Efeknya terhadap Perkembangan Islam)," 2019
- Azra, A. (2013). Islam Nusantara: Perspektif Islam di Indonesia dalam Era Globalisasi. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Azra, A. (1999). Pergolakan Politik Islam. Bandung: Mizan
- Esposito, J. L. (2018). Islam and the Challenges of Democracy: Religion, Ethics, and Political Islam. New York: Oxford University Press.
- Gerges, F. A. (2016). ISIS: A History. Princeton: Princeton University Press
- Gholib, Achmad (2005). Teologi dalam Perspektif Islam. Jakarta: UIN Jakarta Press
- Hasani Ahmad Said & Fathurrahman Rauf, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, "Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam," 2019
- Hassan, N. (2018). The Economic Roots of Extremism. *Journal of Conflict Resolution*, 56(2), 291-313
- Horgan, J. (2005). The Psychology of Terrorism. London: Routledge
- Majelis Ulama Indonesia. (2020). Fatwa MUI tentang Terorisme dan Radikalisme.
- Moghaddam, F. M. (2006). From the Terrorist's Point of View: What They Experience and Why They Come to Destroy. Westport: Praeger Security International.
- Nasution Harun, (1986). Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah, Analisa Perbandingan. Jakarta: UI Press
- Schmid, A. P. (2015). Terrorism and the Media: A Handbook for Journalists. Leiden: Leiden University Press.